

Kita Perlu "Supersemar" Baru

Oleh: P Ari Subagyo

SEIRING berlalunya Orde Baru, Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang misterius dan kontroversial itu seolah menguap dari perbiñcangan. Namun, rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini mengingatkan kita pada surat sakti tersebut.

Rentetan peristiwa bermula dari pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang secara langsung ataupun kebetulan berbuntut pada kriminalisasi beberapa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kriminalisasi memang tidak ditujukan kepada KPK sebagai lembaga, namun praktis membuat lembaga antirasuah itu terganggu. Sekalipun telah ditunjuk pelaksana tugas Ketua dan Wakil Ketua KPK, bagaimanapun jalannya pemberantasan korupsi telah terganggu. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pemberantasan korupsi.

Dalam konteks Indonesia yang terus dililit oleh gulita korupsi, apa yang dapat kita refleksikan dari Supersemar yang diterima Jenderal Soeharto dan Inpres yang akan dikeluarkan Presiden Jokowi? Apakah kita perlu "Supersemar" baru?

Kepemimpinan wacana

Supersemar menjadi (salah satu) kendali kehidupan bangsa Indonesia sepanjang 1966-1998. Supersemar membuktikan bahwa sebuah teks dapat memiliki daya-kuasa. Supersemar tentu tidak bekerja sendiri, tetapi didukung unsur-unsur kekuasaan lainnya, termasuk parlemen, tentara, polisi, dan birokrasi.

Terlepas dari kemungkinan adanya rekayasa bermotif kekuasaan, Supersemar sebenarnya merefleksikan sebuah praktik kepemimpinan wacana (*discursive leadership*).

Efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi. Baldoni (2003) dalam *Great Communication Secrets of Great Leader* menulis: "*leadership effectiveness, both for presidents and for anyone in a position of authority, depends to a high degree upon good communication skills.*"

Menurut Fairhurst (*Discursive Leadership*, 2007), kepemimpinan tidak lain merupakan proses mengelola makna dan pengaruh. Maka buatlah idiom-idiom yang menarik dan sekaligus mampu menggerakkan massa.

Sebagai akronim, Supersemar sungguh cerdas dan memesona. Selain enak didengar, mudah diucapkan, dan gampang diingat, Supersemar mampu menghadirkan kesan mendalam. Penciptanya sungguh memahami masyarakat Indonesia yang sebagian besar mengenal Semar. Dalam Mahabarata, Semar adalah pengasuh, penasihat, sekaligus pelindung para ksatria Pandawa. Supersemar membangkitkan imajinasi tentang "Semar yang super". Imajinasi itu diperlukan bangsa Indonesia yang pada 1965 dilanda sengketa politik dan kesulitan ekonomi.

Kehadiran Supersemar ("Semar yang super") berhasil meniupkan kesejukan di tengah panasnya suhu politik. Secara imajinatif muncul sosok yang diharapkan mengakhiri kemelut politik maupun ekonomi. Kepiawaian Soekarno beretorika dengan pidato Nawaksara tidak sanggup membendung makna dan imajinasi tentang Supersemar yang terus menggelinding bak bola salju.

Bagi Fairhurst (*The Power of Framing: Creating the Language of Leadership*, 2011), dengan wacana, pemimpin melakukan pembingkai (*framing*): menyodorkan perspektif atau cara pandang. Dengan idiom Supersemar, disodorkan frame bahwa komunisme tidak layak disandingkan dengan paham nasionalisme-religius (Pancasila). Alih-alih mampu mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan (3K), komunisme justru menimbulkan perpecahan. Komunisme menjadi musuh Pancasila, sedangkan Supersemar siap menyelamatkan Pancasila.

"Supersemar" baru

Demikianlah, Supersemar (bersama Pancasila) mampu menghadirkan musuh bersama bangsa Indonesia, yakni komunisme. Dalam kehidupan terkini, musuh bersama kita adalah "koruptivisme". Maksudnya, korupsi tidak sekadar sebagai kebiasaan, tetapi telah menjelma menjadi cara berpikir, paham, bahkan menyaingi ajaran agama.

Berbagai persoalan, terutama kemiskinan, merupakan akibat bekerjanya "koruptivisme". Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2014, penduduk miskin di Indonesia berjumlah 27,73 juta orang atau 11,96 persen. Di pihak lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi meningkat pada tahun 2013 dan 2014. Kerugian negara akibat korupsi sepanjang 2001-2012 mencapai Rp 153,1 triliun.

Uang sebanyak itu dapat digunakan untuk membangun 1,1 juta unit rumah, pendidikan gratis bagi

semua siswa dan mahasiswa selama setahun, membeli 50 juta unit komputer untuk sarana belajar, memberikan modal usaha kepada 10 juta sarjana baru untuk berwira-usaha, atau mendirikan 1,7 juta koperasi untuk menyejahterakan rakyat.

Sepanjang 2004-2012, 332 pejabat diduga terlibat kasus korupsi. Di antaranya pejabat eselon dua dan tiga 106 orang, anggota DPR/DPRD 65 orang, walikota dan bupati 31 orang, gubernur 8 orang, hakim 6 orang, jaksa 2 orang, kepala lembaga/kementerian 6 orang, duta besar 4 orang, dan komisioner 7 orang. Jumlah itu belum termasuk pejabat publik dan partai yang ditetapkan sebagai tersangka pada 2013-2014.

Majapahit yang didirikan Raden Wijaya (1293) akhirnya runtuh setelah kematian Hayam Wuruk (1389). Menurut sejarawan Inggris Ricklefs (*Sejarah Indonesia Modern*, 2008), salah satu penyebabnya adalah pemberontakan yang dipimpin bangsawan Bhre Kertabumi (1468). Para pejabat yang korup dapat disamakan dengan bangsawan yang memberontak!

Jadi, kita memerlukan "Supersemar" baru, yakni Surat Perintah Segera Makmurkan Rakyat. "Supersemar" ini wajib dipatuhi semua pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memakmurkan rakyat dengan komitmen tidak korupsi. Mereka yang korup adalah pemberontak! Semoga Inpres yang akan dikeluarkan Presiden Jokowi dapat menjadi "Supersemar" baru itu. ***

Dr P Ari Subagyo MHum, Dosen Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta; penulis buku "Bahasa dan Kepemimpinan" (2012)